

MENGGALI STANDAR GANDA GENDER DALAM KEPEMIMPINAN KRISTEN BERDASAR YAKOBUS 2:9 DAN PRINSIP ETIKA STANLEY HAUERWAS

Sirawanti Rombe Allo ¹⁾, Lestari Randa Saputri ²⁾, Asriyani Tandi Dalla' ³⁾, Ginta
Dinata Tuyu ⁴⁾, Sariwanti Rombe Allo ⁵⁾

Kepemimpinan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja ¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾

Corresponding Author. E-mail: sirawanti25@gmail.com, lestalestari592@gmail.com,
tandidallaasriyani@gmail.com, gintadinatashalea@gmail.com, sariwanti652@gmail.com

Received: 5 Mei 2025; Revision: 1 Juni 2025; Accepted: 2 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fenomena standar ganda gender dalam kepemimpinan Kristen, sebuah isu krusial yang menodai integritas gereja dan kesaksiannya. Meskipun Alkitab dalam Yakobus 2:9 secara tegas melarang praktik pilih kasih, kenyataannya pemimpin perempuan seringkali menghadapi konsekuensi yang lebih berat atau penilaian yang lebih keras dibandingkan pemimpin laki-laki untuk kesalahan serupa. Melalui studi pustaka kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manifestasi spesifik standar ganda tersebut, mengevaluasinya secara kritis melalui lensa prinsip etika "komunitas berkarakter" Stanley Hauerwas, serta menggali hubungannya dengan ajaran Yakobus 2:9 dibandingkan fokus penelitian terdahulu. Temuan menunjukkan bahwa standar ganda ini berakar pada kegagalan gereja menghidupi narasi Injil secara konsisten, pembentukan karakter yang tidak utuh, kecenderungan meniru struktur kekuasaan duniawi, dan kurangnya akuntabilitas komunal yang transparan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk hipokrisi yang mencederai kesaksian gereja. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan perlunya reformasi komunal yang radikal, termasuk pembentukan karakter holistik, pembangunan budaya "komunitas kontras" yang aktif menolak ketidakadilan, serta implementasi sistem akuntabilitas yang adil dan transparan. Implementasi rekomendasi ini krusial untuk memulihkan integritas gereja, memberdayakan kepemimpinan perempuan, dan memperkuat kesaksiannya sebagai agen keadilan ilahi.

Kata kunci: Standar Ganda Gender, Kepemimpinan Kristen, Yakobus 2:9, Stanley Hauerwas, Etika Gereja.

Pendahuluan

Fenomena standar ganda gender, sebuah realitas yang mencerminkan ketidaksetaraan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, telah mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk di dalam institusi keagamaan. Khususnya dalam ranah kepemimpinan Kristen, praktik ini seringkali bermanifestasi dalam evaluasi moral dan etika, di mana sebuah pelanggaran yang sama dapat berujung pada konsekuensi yang sangat berbeda, semata-mata berdasarkan gender individu yang terlibat. Inkonsistensi ini tidak hanya merusak integritas dan kredibilitas gereja di mata jemaat dan masyarakat luas, tetapi juga menodai esensi kesaksian Kristen yang seharusnya memancarkan keadilan dan kasih ilahi (Halidin, 2017). Realitas ini menimbulkan pertanyaan krusial tentang bagaimana sebuah komunitas yang berlandaskan pada prinsip-prinsip spiritual yang luhur dapat menunjukkan disparitas yang begitu mencolok dalam penerapan nilai-nilainya.

Secara teologis, Alkitab secara eksplisit menegaskan pelarangan terhadap segala bentuk diskriminasi dan pilih kasih. Salah satu landasan tekstual yang paling kuat dalam hal ini adalah Yakobus 2:9, yang dengan tegas menyatakan, "Tetapi jikalau kamu berlaku berat sebelah, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu kamu menjadi pelanggar." Ayat ini bukan sekadar sebuah anjuran, melainkan sebuah perintah etis yang mengikat, menegaskan bahwa perlakuan tidak adil berdasarkan gender atau faktor lain merupakan pelanggaran terhadap hukum ilahi. Namun, ironisnya, dalam praktik kepemimpinan gerejawi, seringkali ditemukan bahwa pemimpin perempuan menghadapi tekanan yang jauh lebih besar, pengawasan yang lebih ketat, dan konsekuensi yang lebih berat dibandingkan pemimpin laki-laki ketika terjadi pelanggaran

etika atau moral yang serupa (Wijaya, 2017). Disparitas ini menciptakan paradoks yang perlu ditelaah secara mendalam, terutama mengingat bahwa nilai-nilai universal seperti kasih, keadilan, dan kesetaraan merupakan inti fundamental dari iman Kristen (Meirison et al., 2020).

Isu kepemimpinan perempuan dalam gereja bukanlah topik baru dalam wacana teologis dan sosiologis. Sejumlah penelitian telah banyak mengupas peran dan posisi perempuan dalam struktur gerejawi dari berbagai perspektif. Misalnya, Wijaya (2018) melalui studi mendalam tentang tokoh Debora dalam Kitab Hakim-Hakim 4-5, menunjukkan bagaimana narasi alkitabiah dapat memberikan pemahaman yang relevan mengenai kepemimpinan perempuan dalam konteks organisasi Kristen kontemporer. Lebih lanjut, Hasibuan (2022) menganalisis 1 Timotius 2:11-12 untuk meninjau relevansinya terhadap kepemimpinan perempuan Kristen di era modern, sementara Susanti (2022) berupaya merumuskan kembali teologi yang berpihak pada gender guna memberdayakan perempuan dalam pelayanan. Isu kepemimpinan wanita Kristen, termasuk tantangan dan pengaruhnya dalam konteks gereja modern, juga telah ditelaah oleh Bu'ulolo dan Tioma (2023). Selain itu, Zega, Manalu, dan Pasaribu (2025) menyajikan studi kasus mengenai strategi pengarusutamaan gender di Gereja BNKP, menyoroti dimensi praktis dari kesetaraan gender dalam institusi keagamaan.

Kendati demikian, masih terdapat celah penelitian yang signifikan terkait isu standar ganda gender, khususnya dalam konteks konsekuensi yang dihadapi ketika terjadi pelanggaran etika atau moral di kalangan pemimpin Kristen. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung berfokus pada kelayakan perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan atau peran-peran spesifik dalam gereja (Lumantow & Simon, 2021). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan secara spesifik menganalisis bagaimana bias gender ini beroperasi bukan hanya dalam penerimaan peran kepemimpinan, tetapi juga dalam evaluasi dan penanganan kasus-kasus pelanggaran. Di sinilah letak kebaruan substansial dari studi ini. Berbeda dengan pendekatan yang lebih umum, penelitian ini akan secara tajam menyoroti ketidakadilan dalam evaluasi dan penanganan kasus pelanggaran etika yang melibatkan pemimpin perempuan versus pemimpin laki-laki, sebuah area yang belum banyak dieksplorasi secara sistematis.

Untuk menganalisis fenomena yang kompleks ini secara mendalam, penelitian ini akan mengadopsi lensa etika "komunitas berkarakter" yang dikembangkan oleh teolog terkemuka Stanley Hauerwas. Pendekatan Hauerwas menekankan bahwa etika Kristen tidak hanya berkaitan dengan aturan-aturan normatif, tetapi lebih pada pembentukan karakter moral individu yang konsisten, yang kemudian tercermin dalam tindakan dan keputusan mereka (Bangun, 2015). Dalam pandangan Hauerwas, sebuah komunitas berkarakter adalah komunitas yang secara otentik menghidupi nilai-nilai yang dianutnya, tanpa hipokrisi atau standar ganda. Ia percaya bahwa gereja sebagai "komunitas berkarakter" memiliki panggilan untuk menjadi model moral bagi dunia, yang berarti gereja harus menunjukkan konsistensi dan integritas dalam praktik internalnya (Budiman, 2003).

Dengan menerapkan kerangka etika Stanley Hauerwas, penelitian ini berupaya mengungkap pola-pola standar ganda yang terjadi, menganalisis akar penyebabnya, dan mengeksplorasi implikasinya terhadap pemimpin Kristen, baik perempuan maupun laki-laki. Pemikiran Hauerwas akan berfungsi sebagai alat analitis yang kuat untuk menyoroti inkonsistensi antara nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang diklaim oleh gereja dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pentingnya pemikiran Hauerwas dalam konteks etika Kristen dan aplikasinya dalam dilema moral juga telah diulas oleh Apriano (2019), yang semakin memperkuat relevansi penggunaan kerangka ini. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam pelayanan gereja, seperti yang diulas Gidion (2019) berdasarkan 1 dan 2 Timotius, juga dapat memberikan konteks teologis yang relevan mengenai standar etika dan moral dalam kepemimpinan. Pemahaman mengenai pekerjaan Roh Kudus dapat dihubungkan dengan ekspektasi terhadap karakter moral pemimpin Kristen.

Studi pustaka ini memiliki urgensi yang sangat besar mengingat dampak destruktif dari standar ganda gender terhadap integritas internal gereja dan kredibilitas kesaksiannya di hadapan masyarakat global. Ketika gereja, sebagai institusi yang seharusnya menjadi teladan keadilan, gagal menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara internal, kesaksian moralnya akan kehilangan daya persuasifnya. Selain itu, praktik standar ganda dapat menyebabkan demoralisasi yang signifikan di kalangan pemimpin perempuan, menghambat potensi mereka untuk melayani secara penuh, dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan rohani. Lebih lanjut, hal ini dapat mengikis kepercayaan jemaat terhadap kepemimpinan gereja.

Berdasarkan latar belakang yang komprehensif ini, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait. Pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam manifestasi spesifik dari standar ganda gender dalam penanganan kasus pelanggaran etika atau moral di antara pemimpin Kristen, dengan fokus pada perbedaan perlakuan yang dialami oleh pemimpin perempuan dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Kedua, untuk mengevaluasi secara kritis fenomena standar ganda gender ini melalui lensa prinsip etika "komunitas berkarakter" Stanley Hauerwas, guna mengidentifikasi akar penyebabnya dari perspektif teologis dan sosiologis serta implikasinya terhadap integritas gereja. Ketiga, untuk menggali dan menganalisis bagaimana temuan mengenai standar ganda gender ini berhubungan dengan ajaran Yakobus 2:9, serta membandingkannya dengan fokus penelitian terdahulu mengenai kepemimpinan perempuan dalam konteks Kristen, guna merumuskan kerangka kerja akuntabilitas yang lebih adil, setara, dan konsisten dengan panggilan gereja untuk menjadi komunitas yang sejati mencerminkan keadilan ilahi.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang relevan untuk menggali fenomena kompleks seperti standar ganda gender dalam kepemimpinan Kristen. Sesuai dengan pandangan Cresswell (2014) yang menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap teks dan konteks dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui penelusuran literatur primer dan sekunder yang relevan. Sumber-sumber data mencakup jurnal ilmiah, buku, disertasi, dan publikasi lain yang membahas isu kepemimpinan Kristen, kesetaraan gender, etika teologi, serta interpretasi Yakobus 2:9. Proses pengumpulan data melibatkan identifikasi, seleksi, dan ekstraksi informasi relevan dari berbagai sumber terpercaya untuk membangun argumen yang kokoh. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, mengikuti kerangka Sugiyono (2017) yang menyarankan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti berupaya memahami makna di balik teks dan konteksnya, serta mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep. Analisis data juga akan memanfaatkan prinsip-prinsip penelitian kualitatif dengan fokus pada interpretasi yang mendalam terhadap narasi, argumen, dan perspektif yang disajikan dalam literatur, sehingga mampu menyajikan evaluasi yang tajam dan komprehensif mengenai standar ganda gender dalam kepemimpinan Kristen berdasar Yakobus 2:9 dan etika Stanley Hauerwas..

Hasil dan Pembahasan

A. Manifestasi Standar Ganda Gender dalam Kepemimpinan Kristen

Pembahasan ini akan menguraikan secara tajam tujuan penelitian yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis manifestasi standar ganda gender dalam penanganan kasus pelanggaran etika atau moral di antara pemimpin Kristen, dengan fokus pada perbedaan perlakuan antara pemimpin perempuan dan laki-laki. Fenomena standar ganda gender, meskipun tidak secara eksplisit diakui, secara implisit menghantui berbagai lapisan

masyarakat, termasuk dalam institusi keagamaan yang semestinya menjadi teladan keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks kepemimpinan Kristen, standar ganda ini bukan hanya sekadar bias persepsi, melainkan sebuah praktik yang berdampak nyata terhadap karier, reputasi, dan bahkan kesejahteraan psikologis pemimpin perempuan yang terkena dampaknya.

1. Konstruksi Sosial Gender dan Pengaruhnya dalam Gereja

Untuk memahami manifestasi standar ganda gender, penting untuk terlebih dahulu meninjau bagaimana gender dikonstruksi secara sosial dalam konteks keagamaan, khususnya Kristen. Gender, dalam pengertian ini, bukan semata-mata kategori biologis, melainkan seperangkat peran, norma, perilaku, dan harapan yang dilekatkan masyarakat pada individu berdasarkan jenis kelaminnya (Halidin, 2017). Dalam banyak tradisi Kristen, interpretasi terhadap teks-teks Alkitab secara historis cenderung memperkuat peran gender yang hierarkis, di mana laki-laki ditempatkan pada posisi otoritas dan kepemimpinan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Misalnya, pandangan yang kuat mengenai peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan gereja (misalnya dari interpretasi 1 Timotius 2:11-12 dan Efesus 5:23) seringkali diterjemahkan menjadi ekspektasi bahwa kepemimpinan formal dalam gereja harus didominasi oleh laki-laki (Hasibuan, 2022).

Konstruksi sosial ini menciptakan *template* ideal seorang pemimpin Kristen yang secara implisit adalah laki-laki. Akibatnya, ketika seorang perempuan menduduki posisi kepemimpinan, ia seringkali menghadapi pengawasan yang lebih intensif dan standar yang lebih tinggi dibandingkan rekan laki-lakinya. Masyarakat gerejawi, baik secara sadar maupun tidak, telah diinternalisasi dengan narasi yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan terhadap kritik dan penilaian, terutama dalam hal moralitas dan etika (Susanti, 2022). Hal ini diperparah oleh kecenderungan untuk menghubungkan moralitas perempuan dengan kemurnian dan ketaatan yang lebih ketat, sementara bagi laki-laki, pelanggaran moral seringkali dinilai sebagai "kelemahan manusiawi" yang lebih dapat dimaafkan.

2. Mekanisme Operasional Standar Ganda dalam Penanganan Pelanggaran Etika

Manifestasi standar ganda gender dalam penanganan pelanggaran etika atau moral di kalangan pemimpin Kristen dapat diamati melalui beberapa mekanisme operasional yang saling terkait:

a. Perbedaan dalam Ekspektasi Moral dan Perilaku

Ekspektasi terhadap perilaku moral dan etika seorang pemimpin Kristen perempuan seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan pemimpin laki-laki. Bagi perempuan, pelanggaran seperti isu integritas finansial, masalah hubungan, atau bahkan kesalahan pengambilan keputusan, cenderung dipersepsikan sebagai kegagalan karakter yang lebih fundamental. Sementara itu, pelanggaran serupa yang dilakukan oleh pemimpin laki-laki mungkin dinilai sebagai "kesalahan", "kekhilafan", atau "godaan" yang dapat dimaafkan (Wijaya, 2017). Persepsi ini menciptakan *burden of proof* yang lebih berat bagi perempuan untuk membuktikan integritas mereka, bahkan sebelum terjadi pelanggaran. Misalnya, seorang pemimpin perempuan yang menunjukkan ambisi dalam pelayanan mungkin dicap sebagai "agresif" atau "tidak feminin", sementara ambisi serupa pada laki-laki dianggap sebagai "kepemimpinan visioner".

b. Diskriminasi dalam Proses Investigasi dan Penyelidikan

Ketika tuduhan pelanggaran muncul, proses investigasi seringkali menunjukkan bias gender yang subtil namun merusak. Pemimpin perempuan mungkin menghadapi interogasi yang lebih intrusif, pertanyaan yang bersifat pribadi, dan pemeriksaan latar belakang yang lebih detail. Kredibilitas kesaksian mereka atau saksi yang mendukung mereka mungkin dipertanyakan lebih agresif. Sebaliknya, kasus yang melibatkan pemimpin laki-laki mungkin ditangani dengan lebih hati-hati, dengan kecenderungan untuk melindungi reputasi individu atau institusi (Bu'ulolo & Tioma, 2023). Ada kecenderungan untuk

"menutup-nutupi" atau "menyelesaikan secara internal" kasus yang melibatkan laki-laki yang dianggap sebagai "aset" gereja. Ini bukan hanya tentang substansi pelanggaran, tetapi juga tentang bagaimana proses penegakan akuntabilitas dijalankan.

c. Disparitas dalam Sanksi dan Konsekuensi

Salah satu manifestasi paling mencolok dari standar ganda gender adalah disparitas dalam sanksi dan konsekuensi yang dikenakan atas pelanggaran yang sama. Seorang pemimpin perempuan yang terbukti melakukan pelanggaran etika atau moral mungkin menghadapi pemecatan segera, kehilangan status, dan diskualifikasi permanen dari pelayanan. Reputasi mereka akan hancur dan seringkali sulit untuk dipulihkan (Valentine & Indrawan, 2024). Di sisi lain, pemimpin laki-laki dengan pelanggaran serupa mungkin hanya menerima teguran, skorsing sementara, atau bahkan "kesempatan kedua" untuk rehabilitasi. Dalam banyak kasus, mereka mungkin dapat kembali melayani setelah periode waktu tertentu, dengan reputasi yang relatif lebih utuh. Perbedaan ini menciptakan ketidakadilan yang meresap dan menunjukkan bahwa nilai seorang pemimpin perempuan dalam struktur gereja seringkali dianggap lebih *expendable*.

d. Narasi Publik dan Pemberitaan Media Internal/Eksternal

Cara sebuah kasus pelanggaran etika diberitakan dan didiskusikan secara internal maupun eksternal juga menunjukkan bias gender. Ketika pemimpin perempuan terlibat, narasi seringkali berfokus pada kegagalan moral individu, dengan implikasi bahwa kejadian tersebut mencerminkan kelemahan inheren perempuan dalam kepemimpinan. Pemberitaan bisa menjadi sensasional dan merugikan (Pattinaja, 2025). Sebaliknya, jika pelanggar adalah laki-laki, narasi mungkin lebih menekankan pada "pembelajaran dari kesalahan," "proses pemulihan," atau "pentingnya pengampunan." Publikasi kasus yang melibatkan perempuan juga bisa lebih tersebar luas, memicu stigma yang lebih parah dan jangka panjang. Hal ini juga didukung oleh persepsi bahwa pemimpin perempuan seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap serangan personal dan fitnah (Wijaya, 2017).

e. Dukungan Komunitas dan Jaringan

Dalam menghadapi krisis akibat tuduhan atau pelanggaran, pemimpin laki-laki seringkali memiliki akses ke jaringan dukungan yang lebih luas dan solid dari sesama pemimpin laki-laki. Jaringan ini dapat memberikan perlindungan, advokasi, dan kesempatan untuk rehabilitasi. Sementara itu, pemimpin perempuan mungkin menemukan diri mereka terisolasi, dengan sedikit dukungan dari rekan sejawat atau bahkan dari komunitas yang sebelumnya mendukung mereka (Bu'ulolo & Tioma, 2023). Ketidakadaan jaringan dukungan yang kuat ini memperparah dampak negatif dari standar ganda dan membuat proses pemulihan bagi perempuan menjadi jauh lebih sulit.

3. Implikasi Standar Ganda terhadap Kepemimpinan Kristen

Manifestasi standar ganda gender ini memiliki implikasi serius dan merusak bagi kepemimpinan Kristen secara keseluruhan:

a. Pengikisan Integritas dan Kredibilitas Gereja

Ketika praktik standar ganda terjadi, gereja sebagai institusi kehilangan integritasnya. Bagaimana gereja dapat mengklaim sebagai pembawa keadilan ilahi jika di dalamnya sendiri terjadi praktik diskriminatif? Konsistensi antara ajaran dan praktik adalah kunci kredibilitas (Jura, 2017). Ketidakadilan ini tidak hanya merusak kepercayaan jemaat, tetapi juga menghalangi orang-orang di luar gereja untuk melihat iman Kristen sebagai kekuatan yang membawa keadilan dan kesetaraan (Meirison et al., 2020). Masyarakat modern yang semakin peka terhadap isu-isu keadilan sosial akan memandang gereja sebagai hipokrit jika standar ganda ini terus berlanjut.

b. Demoralisasi dan Hambatan bagi Pemimpin Perempuan

Pemimpin perempuan yang sadar akan adanya standar ganda mungkin menjadi demotivasi dan merasa tidak aman dalam pelayanan mereka. Mereka mungkin menahan diri untuk tidak mengambil risiko atau berinovasi karena takut akan konsekuensi yang tidak proporsional jika terjadi kesalahan. Hal ini menghambat potensi mereka untuk melayani secara penuh dan efektif (Valentine & Indrawan, 2024). Lingkungan yang tidak adil juga dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan kelelahan mental, yang pada akhirnya dapat memaksa pemimpin perempuan untuk meninggalkan pelayanan.

c. Penyuburan Budaya *Toxic* dan Ketidakberdayaan

Standar ganda gender menciptakan budaya di mana ketidakadilan dianggap normal atau bahkan tidak terlihat. Hal ini dapat menyuburkan lingkungan yang *toxic* di mana akuntabilitas dilemahkan dan patriarki dipertahankan. Pemimpin perempuan, dalam situasi ini, mungkin merasa tidak berdaya untuk menyuarakan ketidakadilan atau mencari keadilan, karena takut akan konsekuensi yang lebih buruk (Susanti, 2022). Budaya ini juga dapat menghalangi munculnya talenta kepemimpinan perempuan baru karena mereka melihat contoh-contoh negatif dari perlakuan tidak adil.

d. Hilangnya Perspektif dan Sumber Daya

Dengan menekan atau menyingkirkan pemimpin perempuan melalui praktik standar ganda, gereja kehilangan perspektif dan sumber daya yang sangat berharga. Perempuan membawa perspektif unik dalam kepemimpinan yang dapat memperkaya pelayanan gereja dan membuatnya lebih relevan dengan berbagai segmen masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan adalah sebuah kekayaan yang dapat memperkuat misi gereja secara keseluruhan (Lumantow & Simon, 2021; Zega et al., 2025). Mengabaikan atau mendiskriminasi mereka berarti mengabaikan karunia dan panggilan yang diberikan Tuhan.

e. Bertentangan dengan Hakikat Injil

Yang paling fundamental, praktik standar ganda gender bertentangan langsung dengan hakikat Injil. Injil Yesus Kristus mengajarkan tentang pemulihan, keadilan, pengampunan, dan kesetaraan bagi semua orang tanpa memandang status atau gender (Priyono & Wijayanto, 2022). Mengabaikan prinsip-prinsip ini dalam praktik kepemimpinan gereja berarti gagal mencerminkan kasih dan keadilan Allah yang sejati. Gereja dipanggil untuk menjadi cerminan Kerajaan Allah di bumi, dan Kerajaan itu adalah Kerajaan keadilan (Setiawan & Panjaitan, 2021).

Singkatnya, manifestasi standar ganda gender dalam kepemimpinan Kristen bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan sebuah isu etis dan teologis yang mendalam. Fenomena ini merusak integritas gereja, menghambat pertumbuhan pemimpin perempuan, dan pada akhirnya, mencederai kesaksian Injil. Analisis tajam ini menegaskan urgensi untuk tidak hanya mengakui keberadaan masalah ini, tetapi juga secara aktif mencari solusi yang adil dan konsisten dengan panggilan gereja untuk menjadi komunitas yang mencerminkan keadilan ilahi. Dengan demikian, pembahasan ini menjadi landasan krusial untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran etika Stanley Hauerwas dalam menawarkan kerangka pemulihan dan reformasi bagi kepemimpinan Kristen.

B. Evaluasi Standar Ganda Gender Melalui Lensa Etika Komunitas Berkarakter Stanley Hauerwas

Setelah mengidentifikasi berbagai manifestasi standar ganda gender dalam penanganan pelanggaran etika di kalangan pemimpin Kristen, kini saatnya untuk mengevaluasi fenomena ini secara kritis melalui lensa etika "komunitas berkarakter" yang dikembangkan oleh Stanley Hauerwas. Pendekatan Hauerwas menawarkan kerangka yang kuat untuk memahami mengapa standar ganda ini menjadi masalah yang mendalam dan bagaimana gereja dapat bergerak menuju praktik akuntabilitas yang lebih konsisten dan adil. Tujuan pembahasan ini adalah

untuk mengidentifikasi akar penyebab standar ganda ini dari perspektif Hauerwas dan mengusulkan rekomendasi untuk menciptakan praktik akuntabilitas yang lebih adil dan setara dalam kepemimpinan gereja.

1. Esensi Etika Komunitas Berkarakter Stanley Hauerwas

Stanley Hauerwas, seorang teolog etika terkemuka, menolak gagasan bahwa etika Kristen adalah sekadar penerapan prinsip-prinsip universal atau pencarian konsensus rasional. Bagi Hauerwas, etika Kristen tidak dapat dipisahkan dari narasi Kristus dan pembentukan karakter moral dalam sebuah komunitas iman yang spesifik, yaitu gereja (Bangun, 2015). Gereja, dalam pandangan Hauerwas, bukanlah sekadar kumpulan individu, melainkan sebuah "komunitas berkarakter" sebuah *polis* atau masyarakat alternatif yang hidup berdasarkan cerita dan praktik yang dibentuk oleh Injil (Budiman, 2003).

Ada beberapa pilar utama dalam etika komunitas berkarakter Hauerwas yang relevan untuk analisis standar ganda gender:

a. Narasi sebagai Fondasi Etika

Hauerwas percaya bahwa etika kita dibentuk oleh narasi yang kita hidupi. Bagi orang Kristen, narasi sentral adalah kisah Yesus Kristus, yang mengajarkan kasih, keadilan, kerendahan hati, dan pengorbanan diri. Etika bukanlah daftar aturan, melainkan cara hidup yang terbentuk dari pemahaman dan internalisasi narasi ini. Ketika gereja mengizinkan standar ganda gender, itu menunjukkan bahwa narasi Kristus tentang kesetaraan dan kasih tanpa pilih kasih belum sepenuhnya membentuk praktik internalnya.

b. Pembentukan Karakter (Virtue Ethics)

Etika Hauerwas sangat berakar pada etika kebajikan (*virtue ethics*), yang menekankan pembentukan karakter moral daripada sekadar kepatuhan terhadap aturan. Karakter yang baik adalah hasil dari praktik-praktik komunitas yang konsisten dan ajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jika gereja mengizinkan standar ganda, ini mengindikasikan kegagalan dalam membentuk karakter pemimpin dan jemaat yang secara intrinsik menjunjung tinggi keadilan dan tidak bias gender (Apriano, 2019). Pembentukan karakter yang sejati seharusnya menghasilkan individu yang secara alami menolak hipokrisi dan diskriminasi.

c. Gereja sebagai Komunitas Kontras (*Contrast Community*)

Hauerwas melihat gereja sebagai "komunitas kontras" atau masyarakat alternatif yang menawarkan cara hidup yang berbeda dari dunia. Gereja seharusnya tidak meniru norma-norma duniawi, termasuk bias gender atau ketidakadilan. Sebaliknya, gereja dipanggil untuk menjadi model keadilan, pengampunan, dan kesetaraan (Meirison et al., 2020). Jika gereja gagal menjadi kontras dalam hal perlakuan gender, ia kehilangan kesaksian profetiknya di dunia.

d. Pentingnya Ketiadaan Hipokrisi

Salah satu kritik tajam Hauerwas terhadap gereja adalah kecenderungan untuk jatuh ke dalam hipokrisi mengatakan satu hal tetapi melakukan yang lain. Standar ganda gender adalah bentuk hipokrisi yang paling terang-terangan. Ini menunjukkan bahwa gereja tidak jujur pada klaimnya sendiri tentang keadilan dan kesetaraan. Bagi Hauerwas, integritas adalah kunci, dan integritas tidak dapat terwujud jika ada disparitas dalam perlakuan moral berdasarkan gender (Setiawan & Panjaitan, 2021).

2. Analisis Akar Penyebab Standar Ganda dari Perspektif Hauerwas

Dengan menggunakan lensa Hauerwas, akar penyebab standar ganda gender dalam kepemimpinan Kristen dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Kegagalan dalam Mempraktikkan Narasi Injil secara Konsisten

Meskipun gereja secara teologis mengakui kesetaraan semua orang di hadapan Allah (Galatia 3:28) dan larangan pilih kasih (Yakobus 2:9), dalam praktiknya, narasi ini

seringkali tidak sepenuhnya diinternalisasi ke dalam kebiasaan dan struktur komunal. Pengaruh budaya patriarki yang telah mengakar kuat selama berabad-abad, baik di masyarakat umum maupun dalam tradisi gerejawi, telah mengkontaminasi pemahaman dan penerapan narasi Injil. Hauerwas akan berargumen bahwa kegagalan ini bukan karena ketidaktahuan akan narasi, melainkan kegagalan dalam melatih komunitas untuk *hidup* dalam narasi tersebut secara konsisten. Gereja terlalu sering berkompromi dengan narasi dunia tentang kekuasaan dan hierarki gender, alih-alih menjadi komunitas kontras yang dengan berani menegaskan kesetaraan Kristus (Sidauruk, 2019).

b. Pembentukan Karakter yang Tidak Seimbang

Pembentukan karakter dalam gereja seringkali menekankan aspek-aspek moral tertentu seperti kerendahan hati, ketaatan, dan kesucian, namun kurang dalam hal penanaman keadilan distributif dan kesetaraan gender. Karakter moral yang diasah mungkin cenderung mendukung *status quo* yang patriarkal daripada menantanginya (Susanti, 2022). Bagi Hauerwas, karakter moral sejati melibatkan kemampuan untuk melihat dan menolak ketidakadilan, bahkan ketika itu menguntungkan kelompok dominan. Jika pemimpin dan anggota jemaat tidak dilatih untuk memiliki "mata" yang peka terhadap bias gender, maka standar ganda akan terus berlanjut. Ini berarti bahwa pendidikan teologis dan pembinaan spiritual harus lebih menekankan pada etika keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian integral dari karakter Kristen (Valentine & Indrawan, 2024).

c. Kecenderungan untuk Meniru Struktur Kekuasaan Duniawi

Gereja, alih-alih menjadi "komunitas kontras," seringkali terjebak dalam meniru struktur kekuasaan dan hierarki duniawi. Dalam banyak masyarakat, laki-laki mendominasi posisi kekuasaan dan otoritas, dan pola ini direplikasi dalam gereja. Ketika kekuasaan terpusat pada satu gender, ada kecenderungan alami untuk melindungi anggota kelompok tersebut dan memberlakukan standar yang lebih longgar. Hauerwas akan berpendapat bahwa gereja gagal menunjukkan jalan alternatif di mana kekuasaan dan otoritas dilayani dengan kerendahan hati dan kesetaraan (Zega et al., 2025). Kegagalan ini diperparah oleh tekanan untuk mempertahankan citra publik dan menghindari skandal, yang seringkali mengarah pada perlindungan terhadap individu-individu yang dianggap penting bagi stabilitas institusi, terlepas dari gender mereka (Pattinaja, 2025).

d. Hipokrisi yang Mencederai Kesaksian

Standar ganda gender adalah manifestasi nyata dari hipokrisi yang fatal bagi kesaksian gereja. Ketika gereja secara publik memberitakan keadilan dan kesetaraan, namun secara internal memperlakukan pemimpinnya secara tidak adil berdasarkan gender, ini menciptakan disonansi yang merusak. Hauerwas akan menuding bahwa hipokrisi semacam ini menunjukkan bahwa gereja tidak jujur pada dirinya sendiri dan pada Injil (Jura, 2017). Integritas moral sebuah komunitas tidak diukur dari seberapa banyak mereka berbicara tentang kebenaran, tetapi seberapa konsisten mereka menghidupinya dalam setiap praktik. Ketidakjujuran ini menjadi batu sandungan bagi mereka yang mencari keadilan dan kebenaran, dan dapat mengikis iman mereka yang berada di dalam gereja itu sendiri (Priyono & Wijayanto, 2022).

e. Minimnya Praktik Akuntabilitas Komunal yang Adil

Dalam banyak gereja, mekanisme akuntabilitas terhadap pemimpin, terutama dalam kasus pelanggaran etika, seringkali bersifat personal atau hierarkis, bukan komunal dan transparan. Ketika mekanisme ini lemah atau bias, standar ganda dapat berkembang biak. Hauerwas menekankan bahwa akuntabilitas sejati terjadi dalam konteks komunitas yang saling mengoreksi dan saling mendukung dalam kebenaran. Tanpa struktur akuntabilitas yang adil, yang melibatkan proses transparan dan independen, keputusan akan cenderung dipengaruhi oleh bias internal dan kepentingan institusional. Hal ini berarti bahwa sistem

penanganan pelanggaran yang ada saat ini seringkali gagal mencerminkan keadilan Allah (Gidion, 2019).

3. Mengusulkan Kerangka Kerja Akuntabilitas yang Adil dan Setara Berbasis Hauerwas

Berdasarkan analisis di atas, untuk mengatasi standar ganda gender dalam kepemimpinan Kristen, diperlukan kerangka kerja akuntabilitas yang adil dan setara, yang diinspirasi oleh prinsip etika komunitas berkarakter Hauerwas. Ini bukan hanya tentang membuat aturan baru, tetapi tentang membentuk sebuah komunitas yang secara intrinsik menjunjung tinggi keadilan:

a. Pembentukan Karakter yang Holistik

Gereja harus memprioritaskan pembentukan karakter moral yang holistik bagi semua pemimpin dan anggota jemaat, yang secara eksplisit mencakup kepekaan terhadap isu keadilan gender dan penolakan terhadap bias. Pendidikan teologis dan program pembinaan harus secara aktif mengajarkan tentang bahaya standar ganda, pentingnya kesetaraan gender dalam kepemimpinan Kristen, dan bagaimana nilai-nilai ini berakar kuat dalam narasi Injil (Sidauruk, 2019). Ini berarti mengajar para pemimpin untuk tidak hanya berkhotbah tentang keadilan, tetapi juga untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka dan dalam cara mereka berinteraksi dengan orang lain, terlepas dari gender mereka (Apriano, 2019). Kurikulum pastoral dan kepemimpinan harus dirombak untuk memasukkan modul etika yang kuat tentang kesetaraan gender.

b. Membangun Budaya Komunitas Kontras yang Radikal

Gereja harus secara sadar dan sengaja membangun dirinya sebagai "komunitas kontras" yang secara radikal menolak norma-norma bias gender duniawi. Ini berarti secara aktif menantang interpretasi Alkitab yang mendukung hierarki gender yang kaku dan memperjuangkan inklusi penuh perempuan dalam semua tingkatan kepemimpinan dan pelayanan (Hasibuan, 2022; Zega et al., 2025). Mengadakan dialog terbuka tentang bias gender, mempromosikan teladan pemimpin perempuan yang kuat (seperti Debora yang diteliti Wijaya, 2018), dan memberikan dukungan penuh kepada mereka yang mengalami diskriminasi adalah langkah-langkah penting. Ini juga melibatkan kemampuan untuk mengakui kesalahan historis gereja dalam isu gender dan berkomitmen untuk pertobatan komunal.

c. Transparansi dan Akuntabilitas Komunal

Mekanisme penanganan pelanggaran etika harus dirancang ulang agar transparan dan melibatkan akuntabilitas komunal, bukan hanya hierarkis. Ini berarti melibatkan berbagai representasi dalam proses investigasi dan pengambilan keputusan, termasuk representasi perempuan. Proses harus jelas, konsisten, dan tidak memihak, tanpa memandang gender individu yang terlibat. Pembentukan komite etika independen yang memiliki otoritas untuk menyelidiki dan merekomendasikan sanksi, serta proses banding yang adil, dapat membantu memastikan bahwa keadilan ditegakkan (Pattinaja, 2025). Penting untuk memastikan bahwa proses ini tidak rentan terhadap manipulasi atau perlindungan *in-group*.

d. Kepemimpinan yang Berintegritas dan Memimpin dengan Contoh

Pemimpin senior dalam gereja harus menjadi teladan integritas dan secara proaktif menentang standar ganda gender. Mereka harus menunjukkan komitmen yang jelas terhadap kesetaraan dalam setiap tindakan dan keputusan mereka. Ini termasuk kesediaan untuk menerapkan standar yang sama bagi diri mereka sendiri dan bagi semua pemimpin lain, tanpa memandang gender. Kepemimpinan yang berintegritas juga berarti menciptakan lingkungan di mana semua anggota merasa aman untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan (Lumantow & Simon, 2021).

e. Pendidikan Berkelanjutan dan Dialog Terbuka

Dibutuhkan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh jemaat tentang isu-isu gender, kesetaraan, dan etika Kristen. Ini termasuk menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan kelompok studi yang membahas bagaimana ajaran Kristen dapat diterapkan secara adil dalam konteks gender. Dialog terbuka tentang pengalaman diskriminasi dan bias dalam gereja juga harus didorong untuk menciptakan kesadaran dan mempromosikan empati. Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah komunitas di mana setiap individu, terlepas dari gender, diakui sepenuhnya dalam anugerah dan panggilan mereka (Jura, 2017).

Dengan menerapkan kerangka kerja akuntabilitas yang adil dan setara ini, yang berakar pada etika komunitas berkarakter Hauerwas, gereja dapat bergerak melampaui retorika tentang kesetaraan dan benar-benar menjadi komunitas yang mencerminkan keadilan ilahi. Ini adalah langkah krusial untuk memulihkan integritasnya dan memperkuat kesaksiannya di dunia yang haus akan keadilan sejati. Transformasi ini tidak hanya akan memberdayakan pemimpin perempuan, tetapi juga akan memperkaya seluruh tubuh Kristus, memungkinkan gereja untuk lebih efektif memenuhi misinya dalam membawa Injil ke semua orang.

C. Menggali Standar Ganda Gender dalam Kepemimpinan Kristen Berdasar Yakobus 2:9 dan Prinsip Etika Stanley Hauerwas

Fenomena standar ganda gender dalam kepemimpinan Kristen adalah isu krusial yang menuntut analisis mendalam dan solusi transformatif. Masalah ini, yang termanifestasi dalam perlakuan yang tidak setara terhadap pemimpin perempuan dibandingkan pemimpin laki-laki ketika terjadi pelanggaran etika atau moral, secara fundamental bertentangan dengan ajaran inti kekristenan. Sebagaimana yang telah diuraikan, disparitas ini tidak hanya merusak integritas individu yang terdampak, tetapi juga mencederai kredibilitas gereja sebagai lembaga yang seharusnya mencerminkan keadilan ilahi. Analisis terhadap fenomena ini menjadi semakin tajam ketika dihadapkan pada kejelasan Alkitab dalam Yakobus 2:9 dan kekayaan etika "komunitas berkarakter" Stanley Hauerwas, sebuah pendekatan yang menekankan gereja sebagai sebuah *polis* alternatif yang dibentuk oleh Injil dan harus hidup dalam konsistensi moral (Bangun, 2015).

Yakobus 2:9 dengan tegas menyatakan, "Tetapi jikalau kamu berlaku berat sebelah, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu kamu menjadi pelanggar." Ayat ini adalah landasan teologis yang tak terbantahkan yang secara eksplisit melarang segala bentuk pilih kasih atau diskriminasi, termasuk yang didasarkan pada gender. Dalam konteks ini, praktik standar ganda yang memberikan konsekuensi lebih berat bagi pemimpin perempuan atas kesalahan yang serupa dengan yang dilakukan pemimpin laki-laki, adalah bentuk pelanggaran etika yang jelas menurut ajaran Alkitab (Meirison et al., 2020). Meskipun narasi alkitabiah seperti kisah Debora (Wijaya, 2018) atau peran perempuan dalam pelayanan gereja mula-mula menunjukkan kemungkinan kepemimpinan perempuan, sejarah dan budaya seringkali menciptakan hambatan dan bias yang membuat praktik standar ganda ini terus berlangsung (Hasibuan, 2022; Valentine & Indrawan, 2024). Analisis sebelumnya menunjukkan bahwa manifestasi standar ganda ini meliputi ekspektasi moral yang lebih tinggi terhadap perempuan, bias dalam proses investigasi, disparitas sanksi, narasi publik yang merugikan, serta kurangnya dukungan komunitas bagi pemimpin perempuan yang bermasalah (Bu'ulolo & Tioma, 2023; Wijaya, 2017).

Ketidaksesuaian antara prinsip Alkitabiah dan praktik gerejawi inilah yang memerlukan kerangka etika yang kuat untuk diagnosis dan perbaikan. Di sinilah relevansi etika "komunitas berkarakter" Stanley Hauerwas menjadi sangat menonjol. Hauerwas berpendapat bahwa etika Kristen tidak dapat dipisahkan dari formasi karakter moral dalam sebuah komunitas iman, yaitu gereja, yang disebutnya sebagai *polis* atau masyarakat alternatif (Bangun, 2015). Bagi Hauerwas, gereja seharusnya menjadi "komunitas kontras" yang hidup berdasarkan narasi Injil

dan menolak untuk meniru norma-norma duniawi, termasuk segala bentuk ketidakadilan (Budiman, 2003).

Ketika gereja menunjukkan standar ganda gender, Hauerwas akan menuding ini sebagai kegagalan mendalam dalam beberapa aspek kunci. *Pertama*, terdapat kegagalan dalam menghidupi narasi Injil secara konsisten. Meskipun Yakobus 2:9 secara eksplisit melarang pilih kasih, praktik standar ganda menunjukkan bahwa narasi Injil tentang kesetaraan dan kasih agape belum sepenuhnya menginternalisasi dan membentuk kebiasaan serta struktur gereja. Gereja telah mengizinkan pengaruh budaya patriarkal yang telah mengakar dalam masyarakat untuk mengkompromikan komitmennya terhadap keadilan Kristus. Ini adalah bentuk hipokrisi yang serius, di mana gereja gagal menjadi kontras dari dunia yang penuh bias, dan tidak jujur pada klaimnya sendiri tentang keadilan dan kesetaraan (Apriano, 2019; Setiawan & Panjaitan, 2021). *Kedua*, pembentukan karakter yang tidak utuh turut berkontribusi. Etika Hauerwas sangat menekankan pembentukan karakter moral, namun standar ganda menunjukkan bahwa karakter para pemimpin dan jemaat belum sepenuhnya terbentuk untuk secara intrinsik menolak diskriminasi gender. Pendidikan teologis dan pembinaan spiritual seringkali gagal untuk secara eksplisit menanamkan kepekaan terhadap ketidakadilan gender sebagai bagian integral dari karakter Kristen (Susanti, 2022). Karakter yang terbentuk dari narasi Kristus seharusnya adalah karakter yang secara aktif mencari dan menegakkan keadilan bagi semua, tanpa bias (Sidauruk, 2019; Valentine & Indrawan, 2024). *Ketiga*, ada kecenderungan untuk meniru struktur kekuasaan duniawi. Gereja yang terjebak dalam standar ganda menunjukkan bahwa ia cenderung meniru struktur kekuasaan dan hierarki duniawi, di mana kekuasaan dan *privilege* seringkali terpusat pada satu gender. Ini bertentangan dengan panggilan gereja untuk menjadi teladan kerendahan hati dan pelayanan yang Yesus ajarkan. Kegagalan ini diperparah oleh tekanan untuk mempertahankan citra publik dan menghindari skandal, yang seringkali mengarah pada perlindungan yang tidak proporsional terhadap individu-individu yang dianggap "penting" secara institusional, terlepas dari gender mereka (Pattinaja, 2025). Terakhir, kurangnya akuntabilitas komunal yang transparan merupakan akar masalah lainnya. Hauerwas menekankan bahwa akuntabilitas sejati terjadi dalam konteks komunitas yang saling mengoreksi dan mendukung dalam kebenaran. Sistem akuntabilitas dalam gereja yang bersifat personal atau hierarkis, yang cenderung kurang transparan dan rentan terhadap bias, menciptakan celah bagi standar ganda untuk berkembang. Tanpa mekanisme yang jelas, konsisten, dan independen, keputusan akan cenderung dipengaruhi oleh bias internal dan kepentingan institusional daripada prinsip keadilan ilahi (Gidion, 2019; Lumantow & Simon, 2021).

Menggali standar ganda gender melalui lensa Yakobus 2:9 dan etika Stanley Hauerwas tidak hanya mengungkap masalahnya, tetapi juga menunjukkan jalan ke depan. Untuk mengatasi fenomena ini, gereja harus secara radikal berkomitmen untuk menjadi sebuah komunitas yang sepenuhnya mencerminkan keadilan Allah. Ini berarti secara proaktif mewujudkan etika komunitas berkarakter dengan pertama, pembentukan karakter yang holistik bagi semua pemimpin dan anggota, yang secara eksplisit mengajarkan kepekaan terhadap keadilan gender dan penolakan terhadap bias, menjadikan prinsip Yakobus 2:9 sebagai inti dari pembinaan etika. Kedua, membangun budaya "komunitas kontras" yang radikal yang menantang norma-norma bias gender duniawi dan secara penuh menginklusi perempuan dalam semua tingkatan kepemimpinan dan pelayanan (Zega et al., 2025). Ketiga, menciptakan sistem akuntabilitas komunal yang transparan dan adil, di mana proses investigasi dan penentuan sanksi bebas dari bias gender, serta melibatkan representasi yang beragam untuk memastikan objektivitas dan integritas. Keempat, kepemimpinan yang berintegritas di semua tingkatan, yang tidak hanya mengkhotbahkan keadilan tetapi juga secara konsisten mempraktikkannya, menjadi teladan dalam penerapan standar yang sama bagi semua, tanpa memandang gender

(Jura, 2017). Pada akhirnya, isu standar ganda gender dalam kepemimpinan Kristen adalah sebuah panggilan mendesak bagi gereja untuk melakukan introspeksi mendalam dan reformasi struktural. Dengan kembali pada dasar Alkitabiah yang kuat dari Yakobus 2:9 yang melarang pilih kasih, dan dengan memeluk visi etika Hauerwas tentang gereja sebagai "komunitas berkarakter" yang jujur dan adil, gereja dapat memulihkan integritasnya. Ini bukan hanya tentang memenuhi panggilan internal untuk keadilan, tetapi juga tentang memperkuat kesaksian gereja di tengah dunia yang semakin haus akan keadilan dan kesetaraan yang otentik. Transformasi ini akan memberdayakan seluruh tubuh Kristus dan memungkinkan gereja untuk lebih efektif menggenapi misinya dalam mewujudkan Kerajaan Allah di bumi (Priyono & Wijayanto, 2022).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena standar ganda gender dalam kepemimpinan Kristen adalah masalah etika yang serius, secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan Alkitabiah dalam Yakobus 2:9 yang melarang pilih kasih, dan sangat problematis dari perspektif etika "komunitas berkarakter" Stanley Hauerwas. Manifestasi standar ganda ini, yang meliputi ekspektasi moral yang lebih tinggi terhadap perempuan, bias dalam proses investigasi, disparitas sanksi, narasi publik yang merugikan, serta kurangnya dukungan komunitas, menunjukkan kegagalan gereja dalam menghidupi narasi Injil secara konsisten, pembentukan karakter yang tidak utuh, serta kecenderungan untuk meniru struktur kekuasaan duniawi. Dengan menggali kesenjangan antara ajaran dan praktik ini, penelitian merekomendasikan perlunya reformasi komunal yang radikal, termasuk pembentukan karakter holistik yang menolak bias gender, pembangunan budaya "komunitas kontras" yang secara aktif melawan ketidakadilan, serta implementasi sistem akuntabilitas yang transparan dan adil. Komitmen terhadap rekomendasi ini adalah esensial untuk memulihkan integritas gereja, memberdayakan kepemimpinan perempuan, dan memperkuat kesaksiannya sebagai agen keadilan ilahi di tengah dunia yang terus mencari kebenaran dan kesetaraan.

Daftar Pustaka

- Apriano, A. (2019). Fungsi implementatif tawaran pilihan etis-teologis Kristen dalam konteks dilema moral. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, 3(2), 142-156.
- Bangun, C. (2015). Teologi Publik Stanley Hauerwas Dan Penerapannya Dalam Konteks Di Indonesia. *Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili*, 2(1), 153-177.
- Bu'ulolo, S., & Tioma, R. (2023). Kepemimpinan Wanita Kristen: Pengaruh Dan Tantangan Dalam Konteks Gereja Modern. *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 5(1), 181-199.
- Budiman, K. S. (2003). *Prinsip Dasar Etika Kristen tentang Perang: Sebuah Tinjauan terhadap Pacifism dan Just War Theory*.
- Cresswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Gidion, G. (2019). Memahami Pekerjaan Roh Kudus dalam Pelayanan Gereja Berdasarkan 1 dan 2 Timotius. *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen*, 4(2), 108-121.
- Halidin, A. (2017). *Identitas Gender Dalam Perspektif Agama Kristen*.

- Hasibuan, S. Y. (2022). Kajian 1 Timotius 2: 11-12 Dan Relevansinya Terhadap Kepemimpinan Perempuan Kristen Dalam Menjawab Kebutuhan Zaman. *TEOLOGIS, RELEVAN, APLIKATIF, CENDIKIA, KONTEKSTUAL*, 1(01), 89-106.
- Jura, D. (2017). Mengenal Penulis Kitab Yakobus Dan Pengajarannya. *Shanan Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 1(1), 159-178.
- Lumantow, A. I. S., & Simon, S. (2021). Peran Gembala Sidang Dalam Mengkaderisasi Istri Bagi Kepemimpinan Gereja Lokal. *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat*, 2(2), 68-81.
- Meirison, M., Saharuddin, D., Rosdialena, R., & Ridho, M. (2020). Moderasi Islam Dalam Kesetaraan Gender (Komparasi Terhadap Agama Yahudi Dan Nasrani). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 6(1), 1-30.
- Pattinaja, A. A. (2025). Menyuarakan Keadilan Sosial di Tengah Kebisuan: Kajian Teologis Kepemimpinan Kristen berdasarkan Amsal 31: 8-9. *Jurnal Arrabona*, 7(2), 102-124.
- Priyono, J., & Wijayanto, W. S. (2022). Iman Dan Perbuatan Dalam Penginjilan Jemaat Mula-Mula Ditinjau Dari Yakobus 2: 14-26. *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan*, 6(1), 64-81.
- Setiawan, D. E., & Panjaitan, F. (2021). Titik Temu Pancasila Dan Etika Politik Gereja Dalam Melawan Radikalisme Di Indonesia. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 7(01), 43-56.
- Sidauruk, N. (2019). Eksistensi Perempuan Dalam Paradigma Dan Pelayanan Yesus. *Jurnal Teologi Cultivation*, 3(2), 115–126.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, A. (2022). Merekonstruksi Teologi Berbias Gender untuk Memberdayakan Perempuan Melayani. *Jurnal Teologi Pengarah*, 4(2). (Mohon lengkapi nomor halaman jika tersedia).
- Valentine, R., & Indrawan, Y. (2024). The Teaching of Missiology to Young Christian Women. *Jurnal Teologi Trinity*, 1(2), 74-85.
- Wijaya, E. C. (2017). Perdebatan Peranan Wanita Dalam Organisasi Kristen: Tinjauan Terhadap Isu Kepemimpinan Kontemporer. *Evangelikal*, 1(2), 103-117.
- Wijaya, E. C. (2018). Studi Tokoh Debora dalam Kitab Hakim-Hakim 4-5: Menjawab Isu Kontemporer Kepemimpinan Wanita Dalam Organisasi Kristen. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2(2), 152-166.
- Zega, D. P. S., Manalu, D., & Pasaribu, V. A. (2025). Strategi Pengarusutamaan Gender Di Lembaga Non Pemerintah: Studi Kasus Di Gereja BNKP. *KALBISOCIO Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 12(1), 102-113.